

BAB II

POSISI INDIA-AMERIKA SERIKAT DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL BIOPIRACY DI BAWAH REZIM INTERNASIONAL

Pada bab kedua ini, akan dijelaskan mengenai posisi India dan Amerika Serikat dalam menangani kejahatan transnasional *biopiracy* di bawah rezim internasional. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai aturan rezim-rezim internasional yang bersangkutan terkait dengan *biopiracy*, dalam hal ini yang akan dibahas yaitu rezim *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *Union for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV) dan Protokol Nagoya, kemudian subbab berikutnya adalah sejarah properti intelektual di India serta pandangan India terkait *biopiracy*, kemudian sejarah properti intelektual di Amerika Serikat dan pandangan Amerika Serikat mengenai *biopiracy*, disusul pada subbab berikutnya yaitu posisi India dan Amerika Serikat di bawah rezim internasional, dan yang terakhir adalah rangkuman dari keseluruhan isi bab 2.

2.1 Aturan Rezim Internasional terkait *Biopiracy*

Rezim Internasional yang akan dibahas adalah *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *Union for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV), dan Protokol Nagoya.

2.1.1 Aturan TRIPS terkait *Biopiracy*

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) merupakan perjanjian legal internasional yang wajib diikuti bagi seluruh negara anggota *World Trade Organization* (WTO). TRIPS di negosiasikan pada *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tahun 1994 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1995 (World Trade Organization, 2012).

TRIPS menyediakan *framework* dasar mengenai instrumen-instrumen properti intelektual, seperti paten, hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industrial, proteksi varietas tanaman, dan desain sirkuit terpadu (UNCTAD, 2016). Setiap negara anggota WTO harus memasukkan ketentuan dan aturan TRIPS dalam legislasi properti intelektual domestik mereka (Jose, 2016). Dalam rezim TRIPS, negara anggota wajib melindungi properti intelektual mereka baik melalui paten atau sistem *sui generis* (GRAIN, 2002).

Perjanjian TRIPS menetapkan standar minimum dalam peraturan internasional yang mengatur paten, termasuk di dalamnya yaitu paten terhadap obat-obatan (Jose, 2017). Sebelumnya, varietas tanaman tidak termasuk ke dalam klasifikasi produk yang boleh di patenkan, namun kemudian muncul keputusan dari *U.S Supreme Court* dan *Convention on the Grant of European Patents*, yang mengizinkan paten terhadap varietas tanaman, disusul akhirnya TRIPS melalui pasal 27 akhirnya mencantumkan keterangan mengenai perizinan paten atas hasil genetik tanaman dan juga hewan (Patent Lens, t.thn.).

Pada dasarnya, negara anggota harus memberlakukan kerangka hukum yang diperlukan dengan memasukkan peraturan dasar, antara lain, masa paten

minimal 20 tahun, penyediaan paten produk, dan perlindungan terhadap data uji farmasi dari penggunaan komersial yang tidak adil (Jose, 2016). Selain itu, dalam ketentuannya, hal-hal yang dapat di patenkan harus merupakan penemuan yang baru, memiliki langkah inventif, serta dapat di terapkan dalam industri (Kampf, 2015). Namun, paten yang diatur oleh TRIPS lebih diperhatikan *first applicant* dan bukannya *first inventor* (Dutfield, 2011), sehingga banyak negara yang keberatan karena hal tersebut dianggap menyalahi pengetahuan tradisional.

Secara garis besar TRIPS bukanlah perjanjian yang secara khusus di bentuk untuk menangani diversitas biologikal, melainkan mengatur paten secara general, namun terdapat ketentuan-ketentuan dalam TRIPS sangatlah berpengaruh bagi permasalahan mengenai *biopiracy*.

2.1.2 Aturan WIPO terkait *Biopiracy*

Berawal dari konvensi Paris tahun 1883, Konvensi Berne 1886, dan Perjanjian Madrid 1891, terbentuk *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property* atau lebih dikenal dengan BIRPI (akronim Perancis) pada tahun 1893, namun kemudian BIRPI mengalami perubahan nama hingga akhirnya menjadi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1970, dan bergabung sebagai agen spesialisasi properti intelektual PBB. Seluruh negara anggota PBB berhak menjadi anggota dari WIPO (World Intellectual Property Organization, 2004).

Sama halnya seperti TRIPS, WIPO juga tidak dibuat khusus untuk menangani diversitas biologi dunia, namun dalam praktiknya memiliki pengaruh dalam masalah *biopiracy*. Secara garis besar, WIPO dan TRIPS memiliki kerangka dasar hukum yang sama dan memiliki persamaan kriteria mengenai paten seperti TRIPS yang telah dijelaskan di subbab aturan TRIPS terkait *biopiracy*. Yang membedakan antara kedua rezim ini adalah, kini WIPO sedang mengusahakan lahirnya *Intergovernmental Committee on Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC) yang nantinya akan diberi mandat untuk menghasilkan instrumen legal internasional yang akan meyakinkan efektivitas proteksi dari pengetahuan tradisional, *traditional cultural expressions* (TCEs/*Folklore*) dan sumber daya genetik (UNCTAD, 2016). IGC sendiri telah melakukan pertemuan sebanyak 34 kali, terakhir pada Juni 2017 dalam usaha membahas proteksi atas biodiversitas dan pengetahuan tradisional (WIPO, 2017).

2.1.3 Aturan UPOV terkait *Biopiracy*

Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) dibentuk pada tahun 1961 di Eropa untuk memberikan peternak tanaman hak monopoli legal terhadap temuan mereka dan mengizinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih besar melalui inovasi genetik. Hal tersebut dibuat secara spesifik untuk mempromosikan industri agrikultur (GRAIN, 1999). UPOV secara khusus dibuat sebagai proteksi internasional terhadap varietas turunan tanaman yang memenuhi standar dan syarat untuk ketentuan paten (UNCTAD, 2016),

sehingga UPOV sangat sesuai bagi pengguna yang ingin mendapat keuntungan komersil dari varietas tanaman yang baru dikembangkan.

Negara anggota UPOV sebagian besar adalah negara industri yang menginginkan proteksi maksimal terhadap varietas tanaman temuan mereka, dan sebaliknya, banyak negara berkembang justru tidak menjadi anggota dari UPOV. Terdapat banyak kritik yang dilontarkan kepada UPOV karena mengizinkan dilakukannya monopoli terhadap varietas tanaman dan tidak mengindahkan pengetahuan tradisional. Namun bagi negara maju keberadaan UPOV sangat penting karena dapat memberi keamanan bagi varietas tanaman mereka (GRAIN, 1999). UPOV dalam kaitannya terhadap *biopiracy*, memainkan peran penting karena sifat rezim ini dibuat secara khusus untuk melindungi paten atas varietas tanaman, suatu hal yang telah dikecam oleh negara berkembang.

2.1.4 Aturan Protokol Nagoya terkait *Biopiracy*

Protokol Nagoya diadopsi pada pertemuan ke-sepuluh *Conference of the Parties* (CoP) ke *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang diadakan di Nagoya pada bulan Oktober 2010. Protokol Nagoya secara signifikan meningkatkan tujuan Konvensi mengenai pembagian yang adil dari manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dengan memberikan kepastian hukum dan transparansi yang lebih besar bagi penyedia dan pengguna sumber daya genetik termasuk periset dan industri. Protokol Nagoya diharapkan akan menciptakan insentif untuk melestarikan keanekaragaman

hayati, menggunakan komponennya secara lestari, dan selanjutnya meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati ke arah pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia (Ministry of Environment and Forest, 2014).

Tujuan dari Protokol Nagoya adalah agar negara memastikan pembagian yang adil dari keuntungan yang didapat oleh penggunaan sumber daya genetik, mendapat akses transfer teknologi, serta mengakui peran dari pengetahuan tradisional dengan partisipasi masyarakat tradisional dalam pembuatan keputusan (Narayanan & Pisupati, 2015), selanjutnya menurut artikel 6 dari Protokol Nagoya, akses nasional harus memuat kepastian hukum, kejelasan dan transparansi, memberikan peraturan dan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang, menetapkan peraturan dan prosedur yang jelas untuk mendapatkan *informed consent* dan persyaratan yang disepakati bersama, menyediakan penerbitan izin bila akses diberikan, dan menciptakan kondisi untuk mempromosikan dan mendorong penelitian yang berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan (Wirsing, 2014).

Ketika ketentuan protokol ditetapkan, perusahaan yang mencari akses ke sumber genetik di negara lain harus mematuhi ketentuan nasional negara yang menyediakan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan sebuah kesepakatan yang memberi negara tersebut manfaat yang adil dan merata dari apa yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya dan pengetahuan tradisional (Wirsing, 2014).

2.2 Sejarah Properti Intelektual di India

Sejarah mengenai properti intelektual dalam hal ini yaitu dalam hubungannya dengan hak cipta di India, dapat di lihat sejak Inggris mulai menduduki India, dan memperkenalkan beberapa praktik hukum yang dianut Inggris, untuk kemudian diterapkan ke dalam pemerintahan India, sehingga pada tahun 1911 rezim properti intelektual di India sudah dibentuk berdasarkan standar negara maju (Donovan, 2009). Namun, dalam rangka mendapatkan akses pasar global dalam WTO, India harus meratifikasi perjanjian TRIPS yang merupakan perjanjian influensial mengenai properti intelektual global, termasuk di dalam TRIPS yaitu memperkenalkan paten dalam inovasi farmasi, dan memperluas waktu paten dari 5-14 tahun menjadi 20 tahun (Abramson, 2007). Namun walaupun begitu, India hingga saat ini masih menempati urutan 43 dari 45 negara dalam hal kemampuannya menjaga properti intelektual, hal tersebut dikarenakan adanya kelonggaran administrasi dan praktik pelaksanaannya menderita rugi hingga US\$2.5 miliar dalam kasus pembajakan industri film India, kemudian kebijakan India juga masih lemah dalam hal inovasi bioteknologi dan penemuan farmasi, berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang menempati urutan atas di antara negara-negara lain karena telah memiliki teknologi yang memadai untuk melakukan inovasi bioteknologi dan penemuan farmasi (Bhattacharya A. , 2017).

Tabel 2.1 Indeks Kekayaan Intelektual 2017

No.	Negara	Indeks (max. 35)
1.	Amerika Serikat	32.6
2.	Inggris	32.4
3.	Jerman	31.9
4.	Jepang	31.3
5.	Swedia	31
6.	Perancis	30.9
7.	Swiss	29.9
8.	Singapura	28.6
9.	Korea Selatan	28.3
10.	Italia	27.7
11.	Spanyol	27.5
12.	Australia	27.1
13.	Hungaria	25.4
14.	Selandia Baru	24.1
15.	Polandia	23
16.	Israel	22.3
17.	Kanada	21.4
18.	Taiwan	20.6
19.	Malaysia	17.2
20.	Mexico	16.9
21.	Arab Saudi	16
22.	Turki	15.8
23.	Rusia	15.5
24.	Kolombia	15.2
25.	Uni Emirat Arab	15.2
26.	Chilli	15.1
27.	Cina	14.8
28.	Peru	14.3
29.	Brunei	14.2
30.	Ukraina	14.1
31.	Kenya	14
32.	Brazil	13.2
33.	Afrika Selatan	12.7
34.	Filipina	11.8
35.	Nigeria	11
36.	Ekuador	10.6
37.	Vietnam	10.3
38.	Argentina	10.1
39.	Indonesia	9.6
40.	Thailand	9.5
41.	Mesir	9.4

42.	Algeria	9.3
43.	India	8.8
44.	Pakistan	8.4
45.	Venezuela	6.9

Sumber : *How countries fared in the 2017 Intellectual Property Index, The Atlas, 2017*

Negara-negara tersebut di nilai berdasarkan enam kategori dalam proteksi properti intelektual, yaitu paten, hak cipta, merek dagang, pertukaran rahasia dan akses pasar, pelaksanaan, serta ratifikasi dari perjanjian internasional. Dapat dilihat dari grafis tersebut, India menempati urutan bawah, yaitu 43 dari 45 negara yang di nilai, sedangkan Amerika Serikat menempati urutan pertama dalam hal perlindungan properti intelektual mereka, hal ini juga berdasarkan pada kepentingan India melakukan proteksi terhadap properti intelektual mereka dan keyakinan mereka mengenai adanya *sharing knowledge* dari masyarakat tradisional mereka.

2.3 Pandangan India terkait *Biopiracy*

India telah dikenal sebagai salah satu negara yang secara vokal terus melawan *biopiracy*. India merupakan negara yang menyumbang 7.3% fauna global, serta rumah dari 30.000-50.000 varietas tanaman, selain itu, India juga memiliki lima situs warisan dunia, dua belas cagar biosfer dan enam lahan basah (Padma, 2002), hal tersebut membuat India rentan dalam praktik *bioprospecting* dan juga *biopiracy*.

Dalam menangani kasus-kasus *biopiracy* yang terjadi di daratannya, India tergolong negara yang secara cepat dan vokal berusaha untuk mengklaim kembali sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional mereka yang sempat dipatenkan perusahaan lain, dalam kasus dengan Eropa sendiri, India telah sukses memenangkan

36 aplikasi paten (WIPO, 2011). Selain itu, India juga secara aktif menyuguhkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kasus *biopiracy* dan *bioprospecting*. Parlemen India, pada tahun 2002 menyetujui hukum baru dalam kaitannya dengan biodiversitas. Dikatakan rancangan tersebut akan mempromosikan konservasi dan pengetahuan tradisional, memberikan pengamanan kepada sumber daya biodiversitas India dari perusahaan-perusahaan multinasional, hal tersebut merujuk kepada dibuatnya otoritas nasional biodiversitas di Chennai, dan juga komite-komite manajemen mengenai biodiversitas lokal, selain itu, jika terdapat pelanggaran oleh para peneliti luar maupun perusahaan multinasional mengenai biodiversitas India, maka akan dijatuhkan sanksi hukum berupa kurungan penjara hingga lima tahun, atau denda sebesar US\$20.000 (Padma, 2002).

Selain dasar-dasar hukum mengenai biodiversitas, menurut Dr. Vinod Kumar Gupta, *Senior Advisor & Director of TKDL Indian Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)*, salah satu hal penting dalam penanganan *biopiracy* adalah hadirnya *database* lengkap. India sendiri, telah membangun sebuah *database*, yaitu *Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)*, sebuah *database* yang mencakup 34 juta halaman informasi mengenai formulasi medikal dalam beberapa Bahasa (Inggris, Perancis, Jerman, Jepang dan Spanyol). TKDL merupakan suatu tempat penyimpanan yang unik bagi pengetahuan tradisional India, karena menjembatani jarak linguistik antara pengetahuan tradisional dalam bahasa Sanskrit, Arab, Persia, Urdu, dan Tamil, dengan penguji paten di kantor-kantor paten nasional, hal tersebut membuat TKDL menjadi senjata besar bagi India untuk melawan kasus *biopiracy* (WIPO, 2011). Beberapa kasus

India yang dikenal publik adalah kesuksesan India meruntuhkan paten atas Neem, Kunyit, dan Nap Hal, akibat dari tersedianya bukti yang menunjukkan bahwa tanaman-tanaman tersebut telah digunakan secara turun temurun oleh masyarakat India.

TKDL sangatlah penting keberadaannya, hal tersebut dikarenakan badan pemberi paten bagi perusahaan-perusahaan multinasional seperti *European Patent Office* (EPO) dan *US Patent and Trademark Office* (USPTO) mengharuskan paten terhadap sumber daya genetik sebagai penemuan baru dengan langkah inventif, USPTO dengan lebih tegas mengatakan bahwa suatu penemuan tidak dapat dikatakan baru apabila telah ada dalam publikasi sebelum paten di ajukan baik di negara Amerika Serikat sendiri maupun negara lain (Bastuck, 2006). Hal tersebut membuat TKDL sangatlah penting karena dapat memberikan bukti, apabila sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional India yang telah digunakan beratus-ratus tahun kemudian dipatenkan oleh perusahaan multinasional. Sejak Juli 2009 hingga 2011, TKDL telah mengidentifikasi 215 aplikasi paten di EPO, dan India telah memenangkan 33 sumber daya genetik mereka. Selain itu, kelebihan dari TKDL adalah TKDL mampu meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk mencabut paten atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (WIPO, 2011).

Tabel 2.2 Perbandingan pemutusan paten

Nama Paten	<i>Method for controlling fungi on plants by the aid of hydrophobic extracted neem oil.</i>	<i>Natural Product Cream with Anti-Vitiligo Therapeutic</i>
Nomer Paten	EP436257	EP1747786
Aplikasi & Negara	Thermo Trilogy Corporation, Amerika Serikat	PERDIX EUROGROUP, Spanyol
Tanggal Masuk	20 Desember 1990	24 Juli 2006
Tanggal Keputusan	4 Agustus 1994	Maret 2009
Tanggal Oposisi	14 September 1994	1 Juli 2009
Pemutusan Final	8 Maret 2005	27 Juli 2009
Periode Waktu	10 tahun	3 Minggu

Sumber: *International Conference on the Utilization of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) as a Model for Protection of Traditional Knowledge*, WIPO, 2011

Dapat dilihat dari tabel tersebut, TKDL mempersingkat waktu pencegahan pemutusan hak paten karena TKDL secara langsung telah memberikan bukti bahwa pengetahuan tradisional yang di patenkan telah digunakan selama ratusan tahun di India dan menjadi bagian dari masyarakat tradisional yang ada. Sehingga dengan kehadiran TKDL, mampu meminimalisir waktu yang dibutuhkan dalam rangka mencari sumber jelas asal kekayaan tradisional berasal, dengan meminimalisir waktu, akan berkurang pula dana yang dikeluarkan dalam rangka melawan *biopiracy*.

2.4 Sejarah Properti Intelektual di Amerika Serikat

Semenjak Amerika Serikat melepaskan diri dari Inggris Raya, hampir tiga belas negara bagiannya telah memiliki proteksi properti intelektual kecuali Delaware (Law Office of Jeff Williams PLLC, 2015). Hal tersebut membuktikan bahwa sejak lama

Amerika Serikat telah menekankan pentingnya properti intelektual di negara mereka. Namun karena pada awalnya properti intelektual diartikan berbeda di tiap negara bagian, maka terjadi banyak kesalahpahaman, sehingga akhirnya properti intelektual dimasukkan ke dalam konstitusi Amerika Serikat dan mengikat secara nasional, bukan lagi di masing-masing negara bagian saja (Law Office of Jeff Williams PLLC, 2015).

Properti Intelektual telah masuk dalam Amerika Serikat sejak tahun 1787, dan terus berkembang hingga saat ini. Properti intelektual tersebut berpegang pada pandangan *Eurocentrism* yang berpusat pada ide dari *individual property rights* dan menganggap paten sangatlah penting untuk menandakan kepemilikan mereka agar tidak diambil orang lain (Landon, 2007).

Amerika Serikat juga secara aktif menjadi partisipan perjanjian-perjanjian mengenai Intelektual properti (Association of Research Libraries, t.thn.). Hingga saat ini Amerika Serikat masih menempati urutan tinggi dalam perlindungan terhadap properti intelektual mereka (lihat tabel 2.1).

2.5 Pandangan Amerika terkait *Biopiracy*

Seperti negara maju lain, masalah utama Amerika Serikat terbesar terkait hak paten sesungguhnya adalah kasus pembajakan yang dilakukan oleh umumnya negara-negara berkembang (Bastuck, 2006), dengan teknologi yang maju serta melimpahnya sumber industri, Amerika Serikat tidak termasuk dalam jajaran korban *biopiracy*, seperti India dan negara-negara *megadiversity* lain, bahkan pada tahun 2000 Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak mengerti tentang apa sesungguhnya

biopiracy, hal itu sangat disayangkan negara-negara lain, karena sebagai negara yang aktif menyuarakan kasus pembajakan dan penggiat rezim TRIPS, Amerika Serikat masih belum paham dengan *biopiracy* terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (GRAIN, 2000).

Dalam kasus *biopiracy*, Amerika Serikat memiliki peran penting terhadap pengkabulan paten-paten perusahaan multinasional terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang telah digunakan secara turun temurun. Jika dilanjutkan, maka *biopiracy* dan pematenan pengetahuan tradisional adalah kejahatan ganda, pertama karena hal tersebut berkaitan dengan pencurian kreativitas dan inovasi, dan di lain sisi, badan paten seperti EPO dan UPSTO tidak seharusnya mengkabulkan hak paten terhadap temuan yang tidak baru, namun dengan pengesahan paten atas hal tersebut, maka mengkorbankan masyarakat tradisional yang bersangkutan (Shiva, 1999).

Biopiracy dianggap sebagai wabah, masalah yang terkandung di dalamnya sangatlah dalam dan sistemik, dan dalam mengendalikannya, perlu dilakukan perubahan yang sistematis, bukan *case by case challenge* (Shiva, 1999). Amerika Serikat kini menjadi nasiolitas perusahaan multinasional terbanyak yang menginginkan paten atas sumber daya genetik negara lain, dan tidak hanya dalam kasus dengan India, namun dengan negara Amerika Latin seperti Peru dan Brazil, bahkan di Peru sendiri Amerika Serikat menempati peringkat teratas dalam aplikasi paten sumber daya genetik (Mora, 2016).

Beberapa mengatakan bahwa terjadinya *biopiracy* adalah karena hasil dari sistem IPR negara Barat, dan seharusnya rezim internasional yang mengatur mengenai paten dan segala urusannya yang berkaitan dengan *biopiracy* juga harus mulai melihat pengetahuan tradisional. Hukum paten Amerika Serikat, pada awalnya di desain untuk meminjam inovasi industri dari Inggris, dan paten berfungsi untuk mengimpor *franchise* dari suatu barang, hal tersebut kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi paten yang kita ketahui sekarang, harus bermodalkan langkah-langkah inventif dan terbukti sebagai penemuan baru, namun dalam Hukum Paten Amerika Serikat, ayat 102 mengatakan bahwa penemuan akan dikatakan baru apabila memang baru digunakan di daratan Amerika Serikat, hal tersebut berarti mengesampingkan kenyataan bahwa penemuan tersebut misalkan telah digunakan di daerah lain, namun karena hal tersebut adalah baru di daratan Amerika Serikat, maka dapat disebut sebagai penemuan, hal tersebut termasuk dalam keyakinan tradisional Amerika Serikat yaitu membawa barang persediaan dari negara luar yang belum ada di Amerika Serikat (Shiva, 1999). Tidak berhenti disitu, Amerika Serikat kemudian memperkenalkan paten dalam bentuk varietas tanaman (Sullivan, 2004) yang membawa pada fenomena *bioprospecting* dan *biopiracy*. Selain itu, dalam masalah paten, beberapa negara seperti Cina dan Brazil mensyaratkan aplikasi paten mencakup asal dari sumber daya enetik, namun Amerika Serikat tidak, sistem tersebut ditakutkan akan membuka peluang bagi para pengaju aplikasi paten untuk membagi hasil keuntungan mereka kepada masyarakat tradisional (Servick, 2016).

Kritik tajam terus bermunculan, selain karena kenyataan bahwa varietas tanaman kini mulai bisa dipatenkan, namun juga karena semakin maraknya aplikasi paten terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik negara berkembang di badan paten besar seperti UPSTO, sehingga banyak negara yang meminta Amerika Serikat melakukan *review* terhadap hukum paten agar kasus *biopiracy* dapat di minimalisir.

2.6 Posisi India dibawah Rezim Internasional

India dalam melawan *biopiracy*, menjadi partisipan dalam tiga rezim internasional, yaitu TRIPS, WIPO dan Protokol Nagoya. India di lain sisi tidak menandatangani UPOV karena sesuai dengan pandangan dan pemahaman India, bahwa UPOV tidak memenuhi kebutuhan India, karena mewujudkan filosofi negara-negara industri, dimana tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan perusahaan (Priyanka, 2005).

Bagi India, TRIPS dari WTO, mengikat India sejak tahun 2005, yaitu ketika India telah mendapat rentang waktu transisi selama sepuluh tahun yaitu sejak tahun 1995 untuk membuat legislasi domestik agar sejalan dengan TRIPS (Jose, 2016). Selain memasukkan amandemen-amandemen baru ke dalam hukum intelektual India yang telah ada, India juga membuat legislasi baru untuk meningkatkan hukum properti intelektual India, diantaranya yaitu:

Tabel 2.3 Undang-Undang domestik India terkait paten

No.	Jenis	Tahun
1.	<i>Patent Amandment Act</i>	1995, 1999, 2002, 2005
2.	<i>Protection of Traditional Knowledge under Patent Amandment Act</i>	2002
3.	<i>Industrial Designs: The Design Act</i>	1999
4.	<i>Trademarks: Trademarks Act</i>	1999
5.	<i>The Copyrights Act</i>	1957, 1984, 1992, 1994, 1999, 2010
6.	<i>The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection Act)</i>	1999
7.	<i>Plant Varieties: The Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Act</i>	2001
8.	<i>Layout design of integrated circuits: The Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Act</i>	2000

Sumber : TRIPs and India's intellectual property rights regime, Tojo Jose, 2016

Tabel di atas memperlihatkan legislasi utama yang dibuat untuk mengakomodasi rezim TRIPS dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kemudian, dalam komitmen India terhadap TRIPS dari WTO, India memiliki undang-undang paten India yang diberlakukan sejak tahun 2005, kemudian sebagai bagian dari kewajiban WTO-TRIPS, dibawah artikel 70.8 dan 70.9, India juga membentuk “*mail-box*” untuk menahan aplikasi paten yang memiliki produk farmatikal untuk memastikan kepentingan produsen dalam negeri, terutama yang selama ini bermain dalam formulasi farmasi (Legal Service India, t.thn.).

Dalam WIPO, posisi India kurang lebih sama dengan TRIPS, yaitu kerap memasukkan amandemen baru yang sejalan dengan rezim internasional yang bersangkutan, terutama karena WIPO dan TRIPS sama-sama memuat dasar-dasar dari

Konvensi Berne dan Paris (UNCTAD, 2016). India sendiri telah bergabung dengan WIPO sejak tahun 1975, dan sejak saat itu telah menjadi partisipan dalam perjanjian-perjanjian yang dinaungi WIPO

Tabel 2.4 Daftar Perjanjian WIPO India

No.	<i>Treaty</i>	<i>Signature</i>	<i>Instrument</i>	<i>In Force</i>
1.	<i>Berne Convention</i>		<i>Declaration of Continued Application: 23 April, 1928</i>	1 April 1928
2.	<i>Budapest Treaty</i>		<i>Accession: 17 September, 2001</i>	17 Desember 2001
3.	<i>Madrid Protocol</i>		<i>Accession: 8 April 2013</i>	8 Juli 2013
4.	<i>Marrakesh VIP Treaty</i>	30 April 2014	Ratifikasi 24 Juni 2014	30 September 2016
5.	<i>Nairobi Treaty</i>	30 Juni 1983	Ratifikasi 19 September 1983	19 Oktober 1983
6.	<i>Paris Convention</i>		<i>Accession: 7 September, 1998</i>	7 Desember 1998
7.	<i>Patent Cooperation Treaty</i>		<i>Accession: 7 September, 1998</i>	7 Desember 1998
8.	<i>Phonograms Convention</i>	29 Oktober 1971	Ratifikasi 1 November 1974	12 Februari 1975
9.	<i>Rome Convention</i>	26 Oktober 1961		
10.	<i>Washington Treaty</i>	25 Mei 1990		
11.	<i>WIPO Convention</i>		<i>Accession: 31 Januari 1975</i>	1 Mei 1975

Sumber: WIPO-Administered treaties, contracting party: India, WIPO

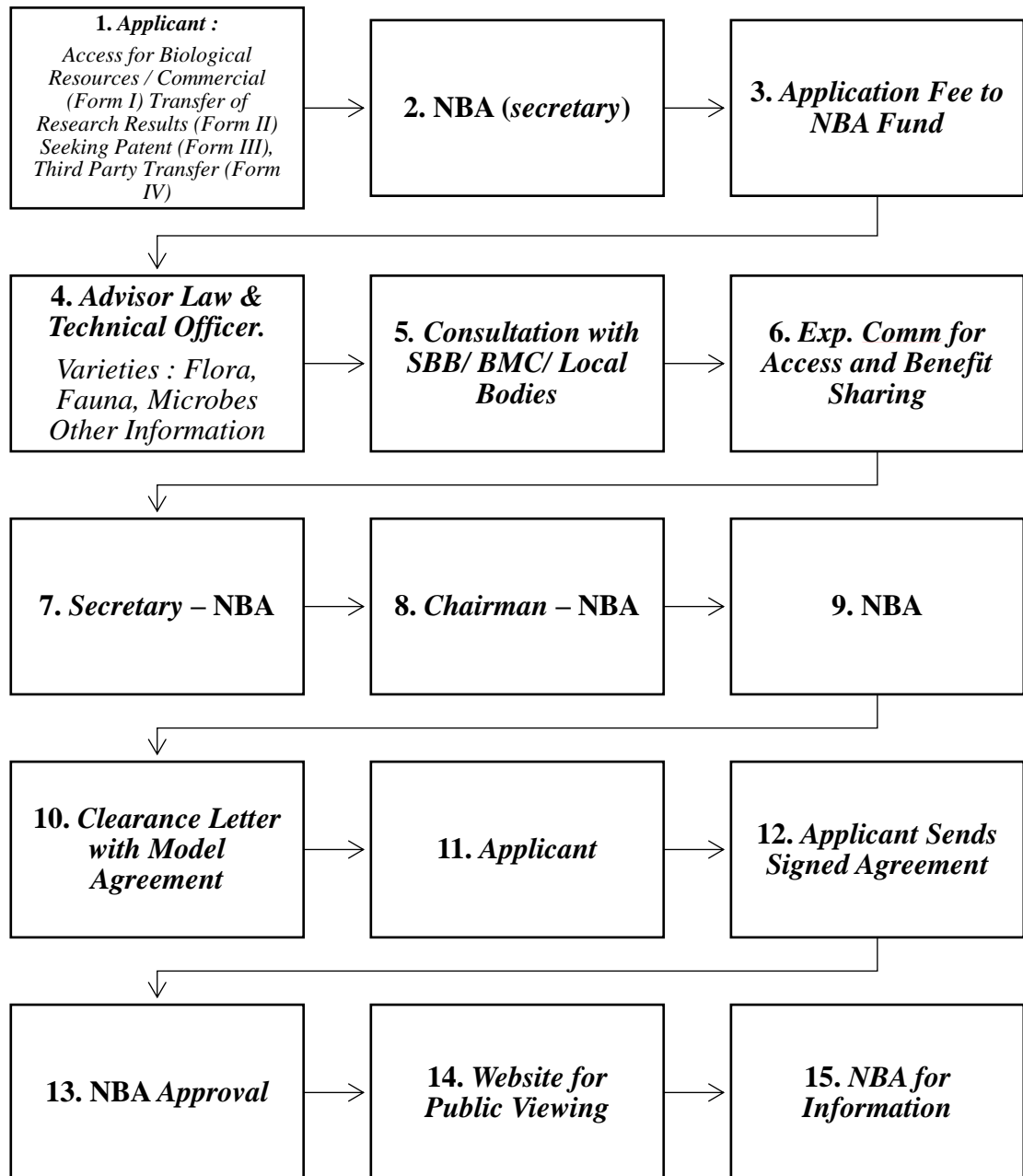
Selain perjanjian-perjanjian di atas, India juga aktif mengikuti pertemuan WIPO *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC), bahkan pada Oktober 2016, India

mewakili Asia Pasifik memberi masukan terkait IGC mengenai masalah kesenjangan dalam menyikapi pengetahuan serta masyarakat tradisional (Balasubramaniam, 2016).

Kemudian, dalam kaitannya dengan rezim selanjutnya yaitu Protokol Nagoya, India menganggap kehadiran Protokol Nagoya sebagai kemenangan bagi negara berkembang, karena mulai diberlakukannya *benefit sharing* dari perusahaan multinasional ke masyarakat tradisional. India sejak 2002, memperkenalkan legislasi domestik India mengenai *access and benefit sharing* (ABS) yang dinamakan *Biological diversity Act*, 2002. Pada Oktober 2012 India menjadi tuan rumah *Conference of the Parties* (CoP) -11 di Hyderabad dan menjadi Presiden Cop hingga tahun 2014 (Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 2014).

Dalam kaitannya dengan protokol Nagoya, India memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai akses dan pembagian keuntungan dalam *Biological Diversity Act* 2002, dan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang di muat, India kemudian membentuk *National Biodiversity Authority* (NBA) yang berfungsi untuk meregulasi pedoman-pedoman dalam hal akses ke dalam sumber daya genetik melingkupi warga India dan perusahaan asing, penentuan pembagian yang adil dan merata, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menentang pemberian paten di negara manapun di luar India apabila paten tersebut ditujukan kepada sumber daya hayati yang diperoleh dari India maupun pengetahuan terkait (Pande, t.thn.)

Gambar 2.1. Mekanisme *Access and Benefit Sharing* di India



Sumber : *Implementation of ABS Mechanisms in India*, Hem Pande, diakses 27 November 2017

Protokol Nagoya yang kemudian di ratifikasi banyak negara dan menjadi suatu hukum internasional diharapkan akan menjadi suplemen baik bagi *Biological diversity act* tersebut (Ministry of Environment and Forest, 2014).

2.7 Posisi Amerika Serikat dibawah Rezim Internasional

Amerika Serikat sebagai negara industri, telah sejak lama mempromosikan perjanjian TRIPS serta mendorong negara-negara lain untuk lebih memperhatikan proteksi atas properti intelektualnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Amerika Serikat sangat sejalan dengan TRIPS, bahkan Amerika Serikat dengan negara maju lain meminta penaikkan norma perlindungan terhadap proteksi intelektual, yang dikenal sebagai TRIPS *plus*, hanya saja TRIPS plus banyak diberlakukan dalam kancan *Free Trade Agreement* dari negara-negara maju. Pada dasarnya TRIPS plus meminta proteksi lebih dari apa yang sebelumnya tertuang dalam TRIPS awal (Jose, 2016).

Tabel 2.5 Undang-Undang Amerika Serikat terkait Paten

No.	Nama	Tahun
1.	<i>An Act to Authorize Appropriations to the Patent and Trademark Office in the Department of Commerce, and for other purposes</i>	1982
2.	<i>Copyright Amendments Act</i>	1992
3.	<i>Trademark Law Treaty Implementation Act</i>	1998
4.	<i>Plant Patent Amendments Act</i>	1998
5.	<i>American Inventors Protection Act</i>	1999
6.	<i>Trademark Amendments Act</i>	1999
7.	<i>Copyright Royalty and Distribution Reform Act</i>	2004

8.	<i>Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act</i>	2008
9.	<i>U.S. Copyright Act</i>	1976, 2003, 2009

Sumber: WIPO Lex: United States of America, diakses 28 November 2017

Kemudian, dalam hal WIPO, Amerika Serikat telah menjadi anggota sejak tahun 1970 dan menjadi partisipan dalam beberapa perjanjian yang dikelola oleh WIPO seperti:

Tabel 2.6 Daftar Perjanjian WIPO Amerika Serikat

No.	<i>Treaty</i>	<i>Signature</i>	<i>Instrument</i>	<i>In Force</i>
1.	<i>Berne Convention</i>		<i>Accession:</i> 16 November, 1988	1 Maret 1989
2.	<i>Budapest Treaty</i>	28 April 1977	<i>Acceptance</i> September 124, 1979	19 Agustus 1980
3.	<i>Madrid Protocol</i>		<i>Accession:</i> 2 Agustus 2003	2 November 2003
4.	<i>Marrakesh VIP Treaty</i>	2 Oktober 2013		
5.	<i>Singapore Treaty</i>	28 Maret 2006	Ratifikasi 1 Oktober 2008	16 Maret 2009
6.	<i>Paris Convention</i>		<i>Accession:</i> 18 Maret 1887	30 Mei 1887
7.	<i>Patent Cooperation Treaty</i>	19 Juni 1970	Ratifikasi 26 November 1975	24 Januari 1978
8.	<i>Phonograms Convention</i>	29 Oktober 1971	Ratifikasi 26 November 1973	10 Maret 1974
9.	<i>WIPO Copyright Treaty</i>	12 April 1997	Ratifikasi 14 September 1999	6 Maret 2002
10.	<i>WIPO Performances and Phonograms Treaty</i>	12 April 1997	Ratifikasi 14 September 1999	20 Mei 2002
11.	<i>WIPO Convention</i>	14 Juli 1967	Ratifikasi 25 Mei 1970	25 Agustus 1970
12.	<i>Beijing Treaty on Audiovisual Performances</i>	26 Juni 2012		

13.	<i>Brussels Convention</i>	21 Mei 1974	Ratifikasi 7 Desember 1984	7 Maret 1985
214.	<i>Hague Agreement</i>		<i>Accession</i> : 13 Februari 2015	13 Mei 2015
15.	<i>Nice Agreement</i>		<i>Accession</i> 23 Februari 1972	25 Mei 1972
16.	<i>Patent Law Treaty</i>	2 Juni 2000	Ratifikasi 18 September 2013	18 Desember 2013
17.	<i>Strasbourg Agreement</i>	24 Maret 1971	Ratifikasi 21 Desember 1973	7 Oktober 1975
18.	<i>Trademark Law Treaty</i>	28 Oktober 1994	Ratifikasi 12 Mei 2000	12 Agustus 2000
19.	<i>UPOV Convention</i>		<i>Acceptance</i> 12 November 1980	8 November 1981

Sumber : WIPO-Administered treatis, contracting party: Amerika Serikat, WIPO

Kemudian, dalam UPOV, Amerika Serikat telah menjadi partisipan sejak tahun 1981 dan secara aktif memasukkan ketentuan-ketentuan UPOV dalam badan domestiknya, bahkan sekretaris jendral dari perserikatan internasional UPOV memuji Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 1980 (WIPO, 1980). Amerika Serikat juga memberitahu sekretaris jendral bahwa mereka memasukkan artikel 37 paragraf 1 dan 2 yang berhubungan dengan perlindungan genus atau spesies yang sama dalam bentuk yang berbeda dan juga sehubungan dengan kriteria patentabilitas dan periode perlindungan yang berlaku untuk varietas tanaman yang biasanya direproduksi secara aseksual (WIPO, 1980). Secara garis besar, aturan UPOV masuk ke dalam *Plant Variety Protection Act* Amerika Serikat (UPOV, t.thn.)

2.8 Kesimpulan

Terdapat perbedaan pemahaman dan pendapat antara Amerika Serikat dan India terkait *biopiracy* melalui pemaparan sebelumnya, mulai dari faktor sejarah antara

kedua negara yang berbeda juga karena hadirnya kepentingan dari masyarakat tradisional di negara berkembang sehingga menciptakan perbedaan kepentingan tiap negara terkait masalah *biopiracy*. Perbedaan tersebut juga dapat dilihat melalui rezim yang mereka ikuti seperti yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Perbandingan Posisi India dan Amerika Serikat dibawah rezim internasional

REZIM	NEGARA	
	INDIA	AMERIKA SERIKAT
TRIPS	√	√
WIPO	√	√
UPOV		√
PROTOKOL NAGOYA	√	

Walaupun India dan Amerika Serikat sama-sama merupakan anggota dari TRIPS dan WIPO, namun keduanya terpisah rezim UPOV dan Protokol Nagoya.

Berbeda dengan TRIPS dan WIPO yang lebih mengacu ke arah paten secara umum, kedua rezim tersebut, UPOV dan Protokol Nagoya merupakan rezim khusus, UPOV dengan paten varietas tanaman dan Protokol Nagoya dengan *access dan benefit sharing*. Kemudian terdapat beberapa poin penting, pertama India dan Amerika dalam hal rezim yang khusus menangani hal yang berkaitan dengan *biopiracy* memiliki perbedaan, dimana India memilih Protokol Nagoya, dan Amerika memilih UPOV, kedua, ada bagian dari perbedaan kultur yang menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai *biopiracy* saat ini antar kedua negara, dan yang ketiga adalah perbedaan pemerintah menangani masalah *biopiracy* antar negara berangkat dari masalah sosial dan kultur masing-masing negara.